

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMITE AUDIT, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE

Martha Widya Sari

marthawidyasari.mws@gmail.com

Titik Mildawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research examines the effect of institutional ownership, audit committees, independent commissioner boards, and audit quality on tax avoidance. Tax avoidance was measured by the Cash Effective Tax Rate (CETR). The research applies quantitatively with a descriptive approach. Furthermore, the population consists of Food and Beverage primary consumer sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The data collection technique used a purposive sampling, in which the sample was based on the criteria given. In line with that, there were 16 companies taken as a sample. Moreover, the data were collected for 4 years (2020-2023) with 64 data samples in total. The data analysis technique used multiple linear regression with SPSS 27. The result shows that institutional ownership does not affect tax avoidance, However, the audit committee has a negative and significant effect on tax avoidance. Meanwhile, an independent commissioner board has a positive and significant effect on tax avoidance. Likewise, audit quality has a positive and significant effect on tax avoidance.

Keywords: institutional ownership, audit committee, independent commissioner board, audit quality, and tax avoidance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, dewan komisaris independen dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. *Tax avoidance* diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian adalah perusahaan makanan dan minuman sektor konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel dipilih melalui metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Dengan menggunakan metode tersebut, diperoleh sampel sebanyak 16 perusahaan makanan dan minuman sektor konsumen primer. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil selama 4 tahun, yaitu dari tahun 2020 – 2023, menghasilkan total 64 data yang dianalisis. Analisis data dilakukan dengan teknik Regresi Linear Berganda menggunakan program SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: kepemilikan institusional, komite audit, dewan komisaris independen, kualitas audit, *tax avoidance*.

PENDAHULUAN

Berdasarkan data World Bank (Bank Dunia) pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus menunjukkan kekuatan telah mengantarkan negara ini ke dalam kategori negara berpenghasilan menengah atas (*upper middle income country*). Pada tahun 2022, pendapatan per kapita Indonesia (GNI per kapita) tercatat sebesar US\$ 4.580, meningkat dibandingkan dengan US\$ 4.140 pada tahun 2021. Meskipun Indonesia berhasil mencapai status ini, peningkatan pendapatan per kapita belum diimbangi dengan kemampuan negara dalam penerimaan pajak, yang dapat dilihat dari angka *tax ratio* Indonesia.

Tabel 1
Rasio Perpajakan (dalam%)

No	Tahun	Rasio Perpajakan (%)
1	2020	8,33

No	Tahun	Rasio Perpajakan (%)
2	2021	9,11
3	2022	10,38
4	2023	10,31

Sumber: Kementerian Keuangan 2024 (diolah)

Berdasarkan data tersebut, rasio pajak Indonesia pada tahun 2020 tercatat sebesar 8,33%, meningkat menjadi 9,11% pada tahun 2021, kemudian 10,38% pada tahun 2022, dan mengalami penurunan menjadi 10,31% pada tahun 2023. Secara keseluruhan, rasio pajak Indonesia masih belum mencapai 15%. Sedangkan menurut Bank Dunia, rasio perpajakan 15% adalah ambang batas minimum yang harus dipenuhi oleh suatu negara untuk tetap berada di jalur pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Tingkat *tax ratio* yang rendah di Indonesia mencerminkan rendahnya kepatuhan pajak. Selain itu, kondisi ini juga mengindikasikan bahwa penerimaan pajak yang diperoleh negara belum maksimal, sehingga memengaruhi pembiayaan pengeluaran negara.

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor konsumen primer makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020 - 2023. Pemilihan objek penelitian ini didasarkan pada peranannya yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, mengingat produk-produk dari sektor ini memiliki permintaan yang relatif stabil meskipun kondisi ekonomi sedang sulit. Selain itu, perusahaan - perusahaan dalam sektor ini umumnya memiliki jaringan rantai pasokan yang sangat kompleks, melibatkan banyak pihak seperti pemasok, distributor, dan anak perusahaan yang tersebar baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi ini menciptakan ruang bagi penerapan praktik transfer pricing, di mana perusahaan - perusahaan multinasional bisa memanfaatkan mekanisme harga antar perusahaan untuk mengoptimalkan keuntungan atau mengurangi kewajiban pajak. Praktik ini menjadi penting untuk diteliti karena dapat memengaruhi pendapatan pajak negara dan keadilan dalam distribusi sumber daya.

Penelitian ini dilakukan karena terdapat variasi hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, dewan komisaris independen, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

Sesuai latar belakang di atas maka pengambilan judul dalam penelitian ini adalah "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, dan Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*".

TINJAUAN TEORITIS

Teori Agensi

Jensen dan Meckling (dalam Triyuwono, 2018) mendeskripsikan teori agensi digunakan untuk memahami hubungan antara dua pihak yang memiliki kepentingan berbeda namun saling terkait. Dalam hal ini, ada dua pihak utama yaitu principal dan agent. Principal adalah para pemegang saham atau pemilik perusahaan, sedangkan agent adalah manajer yang dipekerjakan oleh principal untuk menjalankan perusahaan. Prinsip dasar teori ini adalah bahwa para principal (pemegang saham) memberikan wewenang kepada agent (manajer) untuk mengelola dan membuat keputusan dalam operasional perusahaan.

Pajak (*Tax*)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah kontribusi yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tanpa menerima imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Indonesia memiliki

tiga sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak yaitu *self-assessment system*, *official assessment system*, *withholding assessment system*.

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengatur kewajiban pajak secara legal dengan tujuan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Upaya ini dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak melanggar peraturan, karena perusahaan memandang pajak sebagai beban yang dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Kepemilikan Institusional

Xaviera et al. (2020) Kepemilikan institusional merujuk pada saham perusahaan yang dimiliki oleh berbagai jenis lembaga atau institusi. Institusi yang dimaksud meliputi perusahaan asuransi, perusahaan investasi, bank, lembaga pemerintah, yayasan, dan bentuk organisasi lain yang memiliki kapasitas untuk berinvestasi dalam saham. Selain itu, kepemilikan ini bisa berupa saham yang dimiliki oleh perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT), yang mana lembaga-lembaga ini umumnya memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai investasi mereka atau bahkan berperan aktif dalam keputusan strategis perusahaan yang mereka miliki. Kepemilikan institusional sering kali memberikan dampak besar dalam pengambilan keputusan perusahaan, baik melalui pengawasan terhadap manajemen maupun partisipasi dalam rapat umum pemegang saham.

Komite Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit merupakan sebuah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi Dewan Komisaris.

Ikatan Komite Audit Indonesia menjelaskan tugas utama komite audit pada dasarnya adalah mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Ini meliputi evaluasi terhadap (1) sistem pengendalian internal perusahaan agar dapat menjalankan operasionalnya secara efisien dan mengurangi risiko kesalahan atau kecurangan dengan memastikan bahwa sistem ini berjalan baik dan dapat mendeteksi masalah sejak dini, (2) menilai dan mengawasi laporan keuangan perusahaan agar laporan tersebut akurat, transparan, dan sesuai dengan standar yang berlaku, (3) memantau efektivitas fungsi audit internal untuk memastikan bahwa semua prosedur pemeriksaan dan pemantauan berjalan dengan tepat.

Dewan Komisaris Independen

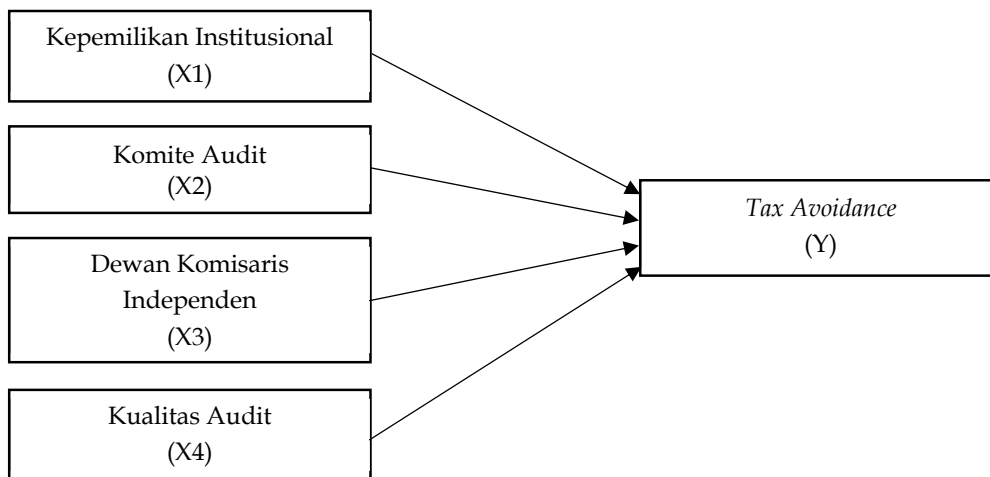
Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan finansial, jabatan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, atau pemegang saham pengendali, serta tidak memiliki hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara objektif dan tanpa pengaruh pihak lain.

Pembentukan dewan komisaris independen di perusahaan harus mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 yang mengatur tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang menetapkan bahwa proporsi anggota komisaris independen minimal tiga puluh persen (30%) dari jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris yang ditunjuk.

Kualitas Audit

Menurut Maharani dan Suardana (dalam Baihaqqi dan Mildawati, 2019) Kualitas audit mencakup seluruh proses yang terjadi saat auditor memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan atau klien. Proses ini melibatkan identifikasi adanya kesalahan, ketidaksesuaian, atau pelanggaran yang mungkin ada dalam laporan keuangan tersebut. Auditor kemudian melaporkan temuan-temuan ini dalam laporan audit tahunan mereka. Kualitas audit yang baik tercermin dari bagaimana auditor menjalankan tugasnya dengan mengacu pada standar profesi yang berlaku, serta kemampuan teknis yang dimilikinya. Sebuah audit yang berkualitas tinggi akan memastikan laporan keuangan yang dihasilkan akurat dan dapat diandalkan, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Rerangka Pemikiran



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi. Lembaga-lembaga ini memiliki tujuan untuk memaksimalkan nilai investasi dengan berbagai strategi yang dapat memperbesar hasil dan mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Menurut hasil penelitian Xaviera *et al.* (2020) menyatakan bahwa semakin besar bagian yang dimiliki oleh institusi dalam suatu perusahaan, semakin besar pula dorongan bagi mereka untuk mengelola perusahaan demi kepentingan mereka sendiri, terutama dalam hal memaksimalkan laba. Avianita (2020) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dikarenakan adanya tekanan yang diberikan pemegang saham institusional kepada manajemen untuk melakukan praktik *tax avoidance*, dengan tujuan agar perusahaan menghasilkan laba yang maksimum dengan beban pajak yang minimum. Maka dapat disimpulkan hipotesis:

H₁: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit merupakan sebuah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi Dewan Komisaris dengan tujuan menjaga integritas dan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan. Hasil penelitian Rosalia (2017) menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh

negatif terhadap *tax avoidance*, hal ini terjadi karena bertambahnya jumlah komite audit dalam perusahaan dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak. Peningkatan jumlah anggota komite audit akan mendorong perusahaan untuk bekerja lebih efisien, termasuk dalam merumuskan kebijakan terkait pajak. Keberagaman pengalaman anggota komite audit memungkinkan mereka untuk memiliki pengetahuan yang cukup dalam penyusunan laporan keuangan dan penerapan prinsip-prinsip pengawasan internal. Maka dapat disimpulkan hipotesis:

H₂: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan finansial, jabatan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, atau pemegang saham pengendali, serta tidak memiliki hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara objektif dan tanpa pengaruh pihak lain. Hasil penelitian Rosalia (2017) dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, hal ini terjadi karena semakin banyaknya komisaris independen yang aktif mengawasi, manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dengan pengawasan yang kuat dan independen, manajemen dihadapkan pada tekanan yang lebih besar untuk bertindak sesuai dengan kepentingan perusahaan dan pemegang saham, bukan semata-mata demi keuntungan pribadi mereka. Sehingga, penghindaran pajak yang berisiko bagi kesinambungan perusahaan dapat dicegah lebih efektif. Sehingga hipotesis dirumuskan:

H₃: Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Kualitas audit mencakup segala hal yang terjadi ketika auditor melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan klien, mengidentifikasi adanya pelanggaran atau kesalahan, dan melaporkannya dalam laporan keuangan tahunan audit. Kualitas audit yang tinggi memainkan peran penting dalam menekan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan. Menurut Feranika (2017) ketika suatu perusahaan diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP) yang memiliki reputasi baik, terutama yang termasuk dalam kelompok *The Big Four* yakni Deloitte, EY, KPMG, atau PwC, risiko terjadinya manipulasi laporan keuangan cenderung lebih kecil. Hal ini disebabkan oleh tingkat kompetensi dan profesionalisme yang dimiliki oleh auditor dari KAP besar tersebut. Mereka umumnya memiliki pengetahuan yang lebih mendalam serta pengalaman yang luas dalam mengidentifikasi berbagai celah atau pola yang mungkin digunakan perusahaan untuk menghindari kewajiban pajak. Sebaliknya, apabila audit dilakukan oleh KAP yang kualitasnya lebih rendah atau tidak termasuk dalam *The Big Four*, ada potensi bahwa pemeriksaan yang dilakukan tidak seketat atau sedalam yang seharusnya. Kelemahan ini bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, baik melalui rekayasa laporan keuangan maupun strategi lain yang bersifat manipulatif. Dengan kata lain, semakin rendah kualitas audit yang dilakukan, semakin besar pula peluang perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan disimpulkan hipotesis:

H₄: Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman di sektor konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan subsektor ini didasarkan pada kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, karena

permintaan terhadap produk-produk tersebut cenderung stabil meskipun pada kondisi ekonomi yang sulit.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam menentukan sampel, digunakan metode *purposive sampling*, dimana sampel ditetapkan melalui pertimbangan tertentu. Kriteria sampel yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) Perusahaan makanan dan minuman pada sektor konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 - 2023. (2) Perusahaan yang menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang rupiah. (3) Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian 2020 - 2023. (4) Perusahaan yang menyediakan data dan informasi keuangan yang lengkap dan relevan dengan kebutuhan penelitian ini, yakni untuk periode 2020 hingga 2023.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder ini berupa laporan keuangan yang telah dipublikasikan dan diaudit dari perusahaan makanan dan minuman pada sektor konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2023.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah *tax avoidance*. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah strategi yang digunakan oleh manajemen untuk memanfaatkan ketentuan perpajakan dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar kepada negara, melalui pemanfaatan kekurangan atau celah dalam hukum perpajakan, tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini penghindaran pajak diukur menggunakan CETR. Rumus CETR dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional, komite audit, dewan komisaris independen, dan kualitas audit.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan suatu kepemilikan saham oleh suatu institusi baik dalam negeri maupun luar negeri. Ardiansyah (2020) variabel kepemilikan institusional dihitung dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki oleh institusi terhadap total saham yang beredar di perusahaan. Berikut adalah rumus untuk menghitung kepemilikan institusional:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham institusional}}{\text{Total saham beredar}}$$

Komite Audit

Komite Audit merupakan komite yang bertanggung jawab terhadap dewan komisaris independen. Amyartha dan Fidiana (2022) komite audit diukur dengan variabel *dummy* dimana nilai 0 (nol) menyatakan jika komite audit < tiga orang, sementara bernilai 1 (satu) jika total komite audit paling sedikit 3 orang.

Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris Independen merupakan individu yang tidak memiliki hubungan kerja sama dengan direksi atau dewan komisaris. Perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen, maka tingkat pengawasan yang dimiliki perusahaan tersebut akan semakin baik. Menurut Riswandari (2021) untuk mengukur variabel dewan komisaris independen adalah dengan menggunakan rasio komisaris independen terhadap total anggota dewan komisaris yang aktif atau yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Dewan komisaris independen dihitung dengan:

$$\text{Dewan komisaris independen} = \frac{\text{Jumlah dewan komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh komisaris}}$$

Kualitas Audit

Kualitas Audit merupakan tingkat keandalan dan efektivitas proses audit yang dilakukan oleh auditor. Menurut Baihaqqi (2019) kualitas audit diukur dengan variabel *dummy* dimana nilai 1 (satu) diberikan jika perusahaan diaudit oleh KAP the big four, namun bernilai 0 (nol) jika perusahaan diaudit oleh KAP *non-Big Four*. KAP *the big four* yang digunakan dalam penelitian adalah *Price Water House Coopers (PWC)*, *Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte)*, *Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) International*, *Ernst and Young (EY)*.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode untuk menyajikan dan menganalisis data dengan menggunakan ukuran-ukuran seperti mean (rata-rata), standar deviasi, varian, nilai maksimum, dan nilai minimum. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang data yang diperoleh, sehingga mempermudah dalam menarik kesimpulan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas adalah prosedur yang digunakan untuk mengukur distribusi data dalam sebuah variabel, guna menentukan apakah distribusi data tersebut normal atau tidak. Pada program SPSS, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Berdasarkan kriteria, jika nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* < 0,05 maka data dianggap tidak berdistribusi normal, sementara jika nilai signifikansinya > 0,05 data tersebut dianggap berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengevaluasi apakah terdapat hubungan korelasi antara variabel independen dalam model regresi linear berganda. Sebuah model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi adanya korelasi tersebut, dapat dilihat melalui *tolerance value* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika *tolerance value* < 0,1 dan *VIF* > 10, maka menunjukkan adanya korelasi, yang berarti model regresi tidak memenuhi kriteria baik. Sebaliknya, jika *tolerance value* > 0,1 dan *VIF* < 10, maka tidak ada korelasi, yang menandakan model regresi tersebut baik.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan varian antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Model regresi yang ideal adalah yang bersifat homoskedastis, yaitu varian antar pengamatan tetap atau tidak menunjukkan perbedaan. Untuk mengidentifikasi adanya heteroskedastisitas, dapat dilihat dari pola yang terbentuk pada grafik *scatterplot*. Jika terlihat pola tertentu yang teratur, seperti titik-titik yang

membentuk pola bergelombang atau yang melebar lalu menyempit, maka hal ini menandakan bahwa model regresi mengalami heteroskedastisitas. Selain itu juga dapat dilakukan menggunakan uji *glejser*. Dalam uji ini, jika hasil regresi menunjukkan bahwa nilai signifikansi (*p-value*) antara residual absolut dan masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model.

Uji Autokorelasi

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara residual dalam serangkaian observasi selama periode tertentu. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan metode *Durbin Watson*. Pada website pelatihan Universitas Indonesia (2021) Keputusan mengenai ada atau tidaknya autokorelasi berdasarkan nilai *Durbin Watson*: (1) Jika nilai *d* (*durbin watson*) lebih kecil dari *dL* atau lebih besar dari (*4-dL*) maka hipotesis nol ditolak, yang berarti ada autokorelasi. (2) Jika nilai *d* (*durbin watson*) terletak antara *dU* dan (*4-dU*), maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. (3) Jika nilai *d* (*durbin watson*) terletak antara *dL* dan *dU* atau diantara (*4-dU*) dan (*4-dL*), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengidentifikasi hubungan linier antara beberapa variabel independen dengan variabel dependen, guna mengetahui apakah hubungan tersebut bersifat positif atau negatif. Pengujian dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \alpha + \beta_1\text{KIN} + \beta_2\text{KOA} + \beta_3\text{DKI} + \beta_4\text{KUA} + e$$

Keterangan :

CETR : *Tax Avoidance* (dihitung menggunakan *cash effective tax rate*)

KIN : Kepemilikan Institusional

KOA : Komite Audit

DKI : Dewan Komisaris Independen

KUA : Kualitas Audit

α : Konstanta

β : Koefisien regresi

e : *error*

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini bertujuan untuk menilai sejauh mana model dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien determinasi, semakin baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan atau memprediksi variabel dependen. Jika nilai (R^2) mendekati 1, ini mengindikasikan bahwa variabel independen hampir sepenuhnya dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai (R^2) mendekati 0, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen memiliki kemampuan yang terbatas dalam menjelaskan atau memprediksi variabel dependen.

Uji F

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan memengaruhi variabel dependen dan apakah layak untuk dianalisis lebih lanjut. Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: jika nilai $p > 0,05$, maka variabel independen tidak dapat secara bersama-sama menjelaskan variabel dependen, sehingga tidak layak untuk dianalisis lebih lanjut. Sebaliknya, jika nilai $p < 0,05$, variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel dependen, sehingga dapat diuji lebih lanjut.

Uji Statistik t

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh satu variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menganalisis pengaruh masing-masing variabel, yaitu kepemilikan institusional, komite audit, dewan komisaris independen, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Keputusan diambil berdasarkan nilai signifikansi t, dimana jika $t < 0,05$, H_0 ditolak, yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara variabel independen dan dependen. Sebaliknya, jika $t > 0,05$, H_0 diterima, yang berarti tidak ada pengaruh signifikan antara keduanya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2
Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KIN	64	0.24	0.93	0.6961	0.19077
KOA	64	0.00	1.00	0.9531	0.21304
DKI	64	0.33	0.50	0.3830	0.06604
KUA	64	0.00	1.00	0.4375	0.50000
CETR	64	0.07	0.62	0.2190	0.08101
Valid N (listwise)	64				

Sumber: Data sekunder, tahun 2025 (diolah)

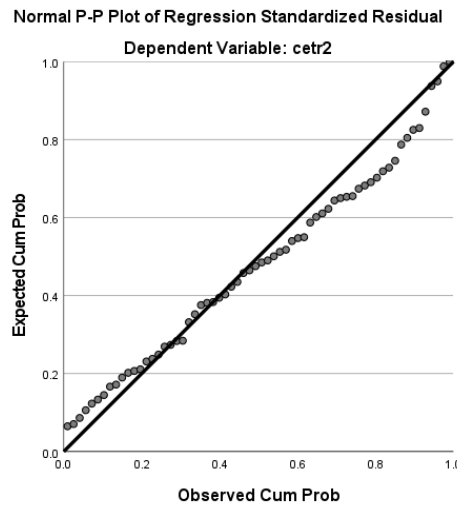
Hasil uji pada Tabel 1 di atas diketahui bahwa pada variabel *tax avoidance* (CETR) memperoleh nilai minimum sebesar 0,07, nilai maksimum sebesar 0,62, nilai mean sebesar 0,219 dan standar deviasi sebesar 0,08101. Nilai mean 0,219 atau 21,9% artinya semakin tinggi persentase CETR (*Current Effective Tax Rate*) suatu perusahaan, mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 22%, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut cenderung membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya, praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan relatif rendah. Sebaliknya, jika CETR perusahaan berada pada tingkat yang jauh di bawah tarif pajak normal, hal ini bisa menjadi indikasi bahwa perusahaan tersebut melakukan strategi penghindaran pajak dalam tingkat yang lebih tinggi untuk menekan beban pajaknya. Pada variabel kepemilikan institusional (KIN) memperoleh nilai minimum sebesar 0,24, nilai maksimum sebesar 0,93, nilai mean sebesar 0,6961 dan standar deviasi sebesar 0,19077. Perusahaan dengan kepemilikan saham institusional di atas rata-rata cenderung mendapat dorongan lebih besar untuk meningkatkan kinerja manajemen, karena adanya pengawasan yang kuat dari investor institusional. Sebaliknya, perusahaan dengan kepemilikan di bawah rata-rata menunjukkan kurangnya dukungan eksternal, sehingga pengawasan manajerial belum optimal. Pada variabel komite audit (KOA) memperoleh nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 1, nilai mean sebesar 0,9531 dan standar deviasi sebesar 0,21304. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel telah memenuhi, bahkan cenderung melampaui, ketentuan minimum jumlah anggota Komite Audit. Dengan kata lain, mayoritas perusahaan memiliki setidaknya tiga orang yang tergabung dalam Komite Audit. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55 Tahun 2015, yang mewajibkan setiap perusahaan untuk membentuk Komite Audit dengan minimal tiga anggota. Pada variabel dewan komisaris independen (DKI) memperoleh nilai minimum sebesar 0,33, nilai maksimum sebesar 0,50, nilai mean sebesar 0,3830 dan standar deviasi sebesar 0,06604. Rata-rata proporsi komisaris independen yang mencapai 38,30% menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel penelitian ini telah memenuhi, bahkan melebihi, ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana diatur dalam regulasi, perusahaan diwajibkan memiliki setidaknya 30% komisaris independen dari total jumlah komisaris. Dengan demikian, angka ini mencerminkan adanya kesadaran dan komitmen perusahaan terhadap

pentingnya pengawasan yang objektif dan independen dalam struktur tata kelola perusahaan. Pada variabel kualitas audit (KUA) memperoleh nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 1, nilai mean sebesar 0,4375 dan standar deviasi sebesar 0,50000 menunjukkan bahwa proporsi perusahaan yang diaudit oleh KAP non-Big 4 dalam sampel penelitian ini lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big 4 dan standar deviasi sebesar 0,50000 memberi arti bahwa penyebaran data bervariasi.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berikut hasil dari uji normalitas menggunakan *normal probability plot* dapat dilihat pada Gambar 2:



Gambar 2
Hasil Uji Normalitas menggunakan P-P Plot
Sumber: Data sekunder, 2025 (diolah)

Selain dalam uji *normal probability plot*, uji kenormalan data juga dapat diperkuat dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* yang disajikan pada Tabel 3:

Tabel 3
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.03566937
Most Extreme Differences	Absolute	0.109
	Positive	0.109
	Negative	-0.059
Test Statistic		0.109
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		0.057
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	0.053
	99% Confidence Interval	Lower Bound Upper Bound

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.

Sumber: Data sekunder, 2025 (diolah)

Hasil uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* ditampilkan pada Tabel 3 di atas. Pada Tabel 3 diperoleh nilai *asympt.sig* (2-tailed) sebesar 0,057. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual sudah memenuhi asumsi berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah metode untuk menilai hubungan antara variabel independen dalam model regresi linear berganda. Untuk memastikan bahwa model tersebut bebas dari multikolinearitas, nilai Variance Inflation Factor (VIF) dapat digunakan sebagai indikator. Jika nilai VIF kurang dari 10, maka model dapat dikatakan bebas dari kasus multikolinearitas. Berikut hasil dari uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4:

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

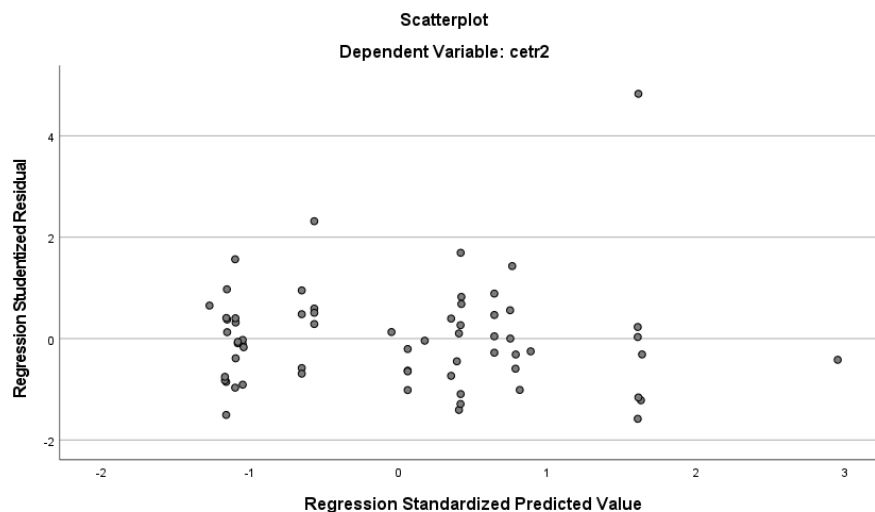
Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
(Constant)			
1 KIN	0.900	1.111	Bebas dari kasus multikolinearitas
KOA	0.938	1.066	Bebas dari kasus multikolinearitas
DKI	0.954	1.048	Bebas dari kasus multikolinearitas
KUA	0.928	1.077	Bebas dari kasus multikolinearitas

Sumber: Data sekunder, 2025 (diolah)

Dari Tabel 4, menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu kepemilikan institusional, komite audit, dewan komisaris independen dan kualitas audit sudah bebas dari kasus multikolinearitas. Nilai VIF semua variabel independen kurang dari 10.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan *scatter plot* dan uji *glejser*. Berikut hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 3 untuk *scatter plot* dan Tabel 5 untuk uji *glejser*.



Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data sekunder, 2025 (diolah)

Pada Gambar 3, terlihat bahwa titik – titik menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi sudah bebas dari kasus heteroskedastisitas.

Tabel 5
Uji Heteroskedastisitas dengan pendekatan Glejser

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	0.004	0.025		0.157	0.876
	KIN	0.014	0.018	0.105	0.777	0.440
1	KOA	-0.008	0.016	-0.065	-0.488	0.627
	DKI	0.044	0.05	0.115	0.878	0.383
	KUA	0.004	0.007	0.070	0.530	0.598

a. Dependent Variable: abs_res

Sumber: Data sekunder, 2025 (diolah)

Serta dibuktikan pada Tabel 5 melalui Uji Glejser diperoleh nilai sig. untuk semua variabel independen nilainya lebih dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa model regresi sudah memenuhi asumsi bebas dari kasus heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Jika nilai d (*durbin watson*) terletak antara dU dan $(4-dU)$, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Berikut hasil dari uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 5:

Tabel 6
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.732 ^a	0.536	0.505	0.03686	2.163

a. Predictors: (Constant), KUA, KOA, DKI, KIN

b. Dependent Variable: cetr2

Sumber: Data sekunder, 2025 (diolah)

Pada Tabel 6, dapat diketahui bahwa model sudah memenuhi asumsi bebas dari kasus autokorelasi. Hal tersebut ditunjukkan melalui nilai Durbin-Watson yang berada diantara $1,7303 < 2,163 < 2,2697$ ($dU < \text{Durbin Watson} < 4-dU$).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk menilai sejauh mana model dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien determinasi, semakin baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan atau memprediksi variabel dependen. Berikut hasil dari uji koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 7:

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.732 ^a	0.536	0.505	0.03686	2.163

a. Predictors: (Constant), KUA, KOA, DKI, KIN

b. Dependent Variable: cetr2

Sumber: Data sekunder, 2025 (diolah)

Pada Tabel 7, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,536 atau 53,6%, artinya bahwa variabel *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel kepemilikan institusional, komite audit, dewan komisaris independen dan kualitas audit sebesar 53,6% dan sisanya yaitu 46,4% dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model.

Uji F

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan memengaruhi variabel dependen dan apakah layak untuk dianalisis lebih lanjut. Berikut hasil dari uji F (uji serentak) dapat dilihat pada Tabel 8:

Tabel 8
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0.093	4	0.023	17.073	.000 ^b
	Residual	0.080	59	0.001		
	Total	0.173	63			

a. *Dependent Variable:* cetr2

b. *Predictors:* (Constant), KUA, KOA, DKI, KIN

Sumber: Data sekunder, 2025 (diolah)

Pada Tabel 16, diperoleh nilai sig. kurang dari 0,05 ($0,00 < 0,005$), hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yang terdiri dari kepemilikan institusional, komite audit, dewan komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Sehingga dari pengujian dinyatakan layak dan dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya, yaitu uji t.

Uji t

Uji t dilakukan dengan tujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh satu variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menganalisis pengaruh masing-masing variabel. Berikut hasil dari uji t (uji parsial) dapat dilihat pada Tabel 9:

Tabel 9
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.154	0.036		4.261	0.000
	KIN	0.013	0.026	0.046	0.494	0.623
	KOA	-0.078	0.023	-0.318	-3.472	0.001
	DKI	0.276	0.072	0.348	3.838	0.000
	KUA	0.056	0.010	0.538	5.847	0.000

a. *Dependent Variable:* tax avoidance

Sumber: Data sekunder, 2025 (diolah)

Berdasarkan Tabel 9 hasil pengujian secara parsial (uji t), diperoleh kesimpulan bahwa : (1) Perhitungan pada Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh sebesar 0,494 dengan tingkat signifikansi 0,623, yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga H_1 ditolak. (2) Perhitungan pada Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh sebesar -3,472 dengan tingkat signifikansi 0,001 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga H_2 diterima. (3) Perhitungan pada Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh sebesar 3,838 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga H_3 diterima. (4) Perhitungan pada Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh sebesar 5,847 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga H_4 diterima.

Pembahasan

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hasil dari koefisien regresi untuk variabel kepemilikan institusional memiliki nilai sebesar 0,013 dan bernilai positif dengan tingkat signifikansi 0,623, yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 serta disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor konsumen primer makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 - 2023.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Faradilla dan Mildawati (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, hal ini tentunya tidak sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat meminimalkan konflik keagenan dengan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen, dimana dengan adanya institusi, manajemen lebih terdorong untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan menghindari tindakan yang merugikan perusahaan, sehingga mengurangi potensi konflik keagenan.

Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hasil dari koefisien regresi untuk variabel komite audit memiliki nilai sebesar -0,078 dan bernilai negatif dengan tingkat signifikansi 0,001 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 serta disimpulkan bahwa variabel komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor konsumen primer makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 - 2023. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dengan adanya komite audit, independensi auditor dapat ditingkatkan, sehingga mempersulit manajemen dan auditor untuk melakukan kolusi. Dampaknya, praktik penghindaran pajak cenderung menurun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Rosalia (2017) yang menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, hal ini terjadi karena bertambahnya jumlah komite audit dalam perusahaan dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak. Dalam perspektif teori agensi, komite audit memegang peran krusial dalam mengawasi dan memastikan bahwa praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen tidak merugikan kepentingan pemegang saham dan perusahaan secara keseluruhan. Komite audit yang berfungsi dengan baik dapat membantu menjaga keseimbangan antara kepentingan manajemen dan pemegang saham, serta menjamin bahwa perusahaan beroperasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hasil dari koefisien regresi untuk variabel dewan komisaris independen memiliki nilai sebesar 0,276 dan bernilai positif dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 serta disimpulkan bahwa variabel dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor konsumen primer makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 - 2023.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin banyak atau semakin kuat peran dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut terlibat dalam upaya penghindaran pajak. Faktor ini dapat timbul karena meskipun dewan komisaris independen secara umum berperan untuk memastikan integritas dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku, dalam kenyataannya, peran mereka juga bisa memberikan kesempatan bagi manajemen perusahaan untuk mengeksplorasi berbagai cara yang sah dalam mengurangi kewajiban pajak, yang dapat memengaruhi strategi pengelolaan pajak perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan Dewi (2019) yang menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hasil dari koefisien regresi untuk variabel kualitas audit memiliki nilai sebesar 0,056 dan bernilai positif dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 serta disimpulkan bahwa variabel kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor konsumen primer makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 - 2023.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas audit yang diterima oleh sebuah perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut melakukan strategi penghindaran pajak. Perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh kantor akuntan besar seperti *The Big Four*, umumnya memberikan tingkat kepercayaan yang lebih besar terhadap akurasi dan transparansi informasi keuangan yang disajikan. Dengan adanya kepercayaan tersebut, perusahaan merasa memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk menerapkan strategi penghindaran pajak secara cermat dan legal yaitu dengan memanfaatkan celah-celah yang diizinkan dalam peraturan perpajakan tanpa harus melanggar hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa audit berkualitas tinggi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan terhadap potensi pelanggaran, tetapi juga dapat menjadi sarana bagi perusahaan untuk mengoptimalkan kewajiban pajaknya. Dengan kata lain, audit bisa berperan ganda yaitu di satu sisi menjaga akuntabilitas dan kepatuhan, namun di sisi lain memberikan legitimasi bagi perusahaan untuk melakukan efisiensi pajak melalui pendekatan yang sah. Hasil penelitian ini sejalan dengan Tamara dan Saragih (2021) yang menyimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan tujuan menguji pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, dewan komisaris independen dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman sektor konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 - 2023, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : (1) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa institusi yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas terhadap tindakan manajemen perusahaan kurang menjalankan perannya dengan efektif. (2) komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, pengaruh negatif pada penelitian menunjukkan bahwa semakin baik komite audit menjalankan tugasnya, semakin kecil kemungkinan perusahaan terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang agresif. (3) Dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, pengaruh positif pada penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak atau semakin kuat peran dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut terlibat dalam upaya penghindaran pajak. (4) kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas audit yang diterima oleh sebuah perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut melakukan strategi penghindaran pajak.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang diharapkan dapat diperbaiki pada penelitian - penelitian berikutnya. Salah satu keterbatasan tersebut adalah penggunaan model dan pendekatan untuk mendeteksi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang belum dapat dikatakan cukup efektif dalam memengaruhi terjadinya penghindaran pajak pada perusahaan di sektor konsumen primer, khususnya makanan dan minuman. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa analisis ini hanya didasarkan pada laporan keuangan

perusahaan, sementara data mengenai praktik penghindaran pajak yang sesungguhnya sangat sulit untuk diperoleh secara langsung.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa temuan yang dapat menjadi bahan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, dewan komisaris independen, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: (1) diharapkan penelitian selanjutnya dapat menemukan cara yang lebih tepat untuk mengukur dan mendeteksi penghindaran pajak dengan lebih akurat. Dikarenakan penggunaan CETR belum dapat dikatakan cukup efektif. (2) Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan variabel yang dianalisis, seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau faktor-faktor makroekonomi yang berpotensi memengaruhi perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*). (3) penelitian juga dapat memanfaatkan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin, 2021. Uji Autokorelasi Berdasarkan Nilai Durbin Watson dengan SPSS. <https://pelatihan-ui.com/uji-autokorelasi-berdasarkan-nilai-durbin-watson-dengan-spss-18/>. 3 Februari 2025 (19:45).
- Andini, R., A.D. Andika., dan A. Pranaditya. 2021. Analisa Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 529-537.
- Ardiansyah, A., dan W. Wahidahwati. 2020. Analisis Pengaruh Likuiditas, Leverage, Arus Kas dan Kepemilikan Institusional Terhadap Financial Distress. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(8).
- Baihaqqi, M. R., & T. Mildawati. 2019. Pengaruh Faktor Corporate Governance, Intensitas Aset Tetap dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(9).
- Dewi, N. M. 2019. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(1), 40-51.
- Eksandy, A. 2017. Pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)(studi empiris pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1-20.
- Faradilla, R. N., & Mildawati, T. 2021. Pengaruh Good Corporate Governance, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Praktik Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(9).
- Feranika, A. 2017. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, dan Leverage terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia dengan Tahun Pengamatan 2010-2014). *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja)(E-Journal)*, 2(2), 12-21.
- Fitriani, P.A. 2022. Asas dan Tiga Sistem Pemungutan Pajak Indonesia. <https://pajak.go.id/id/artikel/asas-dan-tiga-sistem-pemungutan-pajak-indonesia>. 4 Desember 2024 (14:29).

- Fitrianingsih, D., & P. Wulandari. 2024. Pengaruh Komite Audit dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance di Perusahaan Manufaktur Food and Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 17(1), 294-302.
- Ikatan Komite Audit Indonesia. *ikai.id*. Diakses tanggal 23 November 2024
- Kamul, I., dan E. Riswandari. 2021. Pengaruh gender diversity dewan, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan konsentrasi kepemilikan terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 218-238.
- Lathifa, D. 2022. Tax Avoidance: Definisi dan Pencegahannya di Indonesia. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/tax-avoidance-definisi-dan-pencegahannya-di-indonesia>. 7 Desember 2024 (03:28).
- Lingga, I. S. 2012. Aspek perpajakan dalam transfer pricing dan problematika praktik penghindaran pajak (tax avoidance). *Jurnal Zenit*, 1(3), 210-221.
- Ma'sum, M. A., J. Jaeni., dan A Badjuri. 2023. Tax avoidance dalam perspektif agency theory. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1873-1884.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. 23 Desember 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 406. Jakarta
- Pratama, Y.P.A. 2023. Pengaruh Leverage, Profitabilitas, dan Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak. <https://pajak.go.id/en/node/102376>. 7 Desember 2024 (03:48).
- Pratomo, D., & R.A. Rana. 2021. Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91-103.
- Purbowati, R. 2021. Pengaruh good corporate governance terhadap tax avoidance (penghindaran pajak). *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 4(1), 59-73.
- Setiawan, H. 2014. Transfer pricing dan risikonya terhadap penerimaan negara. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Sujannah, E. (2021). Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Transfer Pricing, Penghindaran Pajak: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 66-74.
- Sumekar, D. R., S. Mulyani., & S. Nuridah. 2023. Analisis pengaruh thin capitalization, komite audit dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor keuangan di bursa efek Indonesia Tahun 2020-2022. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4533-4541.
- Tamara, M., & Saragih, R. H. 2021. Pengaruh Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektorlq45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014-2018. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*, 2(2), 86-94.
- Tarmizi, A., & D. H. Perkasa. 2022. Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga, dan thin capitalization terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Perspektif Manajerial dan Kewirausahaan (JPMK)*, 3(1), 47-61.
- Triyuwono, E. 2018. Proses kontrak, teori agensi dan corporate governance (contracting process, agency theory, and corporate governance). Available at SSRN 3250329.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta
- Xaviera, A. X. A., Muslih, M., & Kurnia, K. 2020. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018. *Jurnal Mitra Manajemen*, 4(5), 692-707.
- Yuliesti, R., & S. Sapari. 2017. Pengaruh profitabilitas, likuiditas dan corporate governance terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(3).